

## Manajemen Kesiswaan Pada Sekolah Inklusi

Achmad Hufron<sup>1)</sup>, Ali Imron<sup>2)</sup>, Mustiningsih<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Sekolah Dasar Negeri 5 Kebumen-Jawa Tengah

<sup>2)</sup>Manajemen Pendidikan-Universitas Negeri Malang

E-mail: hufron\_achmad@yahoo.co.id

**Abstract:** The purpose of this study is to describe the student management at inclusion school. This study used a qualitative descriptive approach and multi-site studies design. The techniques of the study were collecting data used interviews, observation and documentation. Data analysis was divided into two phases of data analysis; those are data analysis site and site across data analysis. In checking validity of the data in this study used three kind of validities that are credibility, dependability, and confirmability. Based on those technique data analyses, it is found across the site as follows. First of all, the implementation of new admissions both regular students and students with special needs conducted in line with the new students enrollment requirements of Dikpora Kebumen. In state Elementary School 1 Surotrunan, new students who have special needs were selected and accepted, the range is for students with low till medium needs. In the other hand, State Elementary School Pecarikan using a system of promotion. Secondly, students are placed in a class, moreover, students' grouping is based on their intelligence, academic ability and special needs. Thirdly, student treatments are given through some habitual activities, extracurricular activities, and incidental activities. Schools require guider (shadow) on each ABK's.

**Key Words:** management, student, educational inclusion

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan manajemen kesiswaan pada sekolah inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi multi situs. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data terdiri atas analisis data dalam situs dan analisis data lintas situs. Pengecekan keabsahan data menggunakan tiga kriteria, yaitu kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Temuan lintas situs dalam penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan PPDB baik siswa reguler maupun siswa ABK dilaksanakan bersamaan sesuai dengan juklak PPDB di SDN 1 Surotrunan, siswa ABK di seleksi yang diterima adalah ABK yang mempunyai jenis kebutuhan ringan ke sedang, sedangkan SDN Pecarikan menggunakan sistem promosi. *Kedua*, siswa ditempatkan menjadi satu kelas, pengelompokan siswa berdasarkan kecerdasan, kemampuan akademik, dan kebutuhan khusus. *Ketiga*, pembinaan kesiswaan dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, ekstrakurikuler, dan kegiatan incidental. Sekolah mewajibkan pendamping (*shadow*) untuk siswa ABK.

**Kata kunci:** manajemen, kesiswaan, sekolah inklusi

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam pasal 1 peraturan ini yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-

sama dengan peserta didik pada umumnya. Lebih lanjut pada pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif

bagi semua peserta didik. Memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada setiap anak secara demokratis dan tidak diskriminatif untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Imron (1994:3) manajemen di sekolah meliputi (a) manajemen pembelajaran; (b) manajemen peserta didik/kesiswaan; (c) manajemen tenaga kependidikan; (d) manajemen sarana dan prasarana pendidikan; (e) manajemen keuangan; (f) manajemen kelas; (g) manajemen hubungan sekolah dan masyarakat; dan (h) manajemen layanan khusus pendidikan. Di antara manajemen-manajemen tersebut, manajemen peserta didik menjadi sangat penting karena pusat layanan pendidikan di sekolah ada pada peserta didik. Semua kegiatan yang ada di sekolah, baik yang berkenaan dengan manajemen pengajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat maupun layanan khusus pendidikan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang andal bagi peserta didik.

Pada observasi studi pendahuluan dan hasil wawancara pada tanggal 28 September 2015 di SD Negeri Pecarikan Prembun Kebumen terdapat 13 anak berkebutuhan khusus dengan rincian 7 anak tunagrahita, 2 anak hiperaktif, 1 anak *down syndrom*, 2 anak tunarungu dan tunawicara, dan 1 anak penderita autisme. Dengan banyaknya anak yang berkebutuhan khusus pengelolaan kesiswaan dan kegiatan belajar mengajar agak kerepotan karena di sekolah tersebut belum ada guru pembimbing khusus. Perhatian dari pemerintah kabupaten juga belum optimal terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sementara itu, di SD Negeri 1 Surotrunan terdapat lebih banyak anak berkebutuhan khusus, yaitu 24 anak dengan rincian 6 anak tunagrahita, 1 anak autisme ringan, 1 anak hiperaktif, 11 anak *slow leaner* (lamban belajar), 1 anak tunawicara, dan 4 anak tunaganda.

Dari hasil observasi awal dan wawancara kedua sekolah tersebut dipilih sebagai objek penelitian dengan alasan sekolah tersebut merupakan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kebumen yang mempunyai beberapa keunikan dalam keragaman siswanya dari segi ekonomi, agama, budaya maupun aspek-aspek lainnya. Banyak sekolah negeri yang enggan menyelenggarakan sekolah inklusi dengan alasan merepotkan, menghambat siswa yang lain, dan penurunan prestasi akademik secara keseluruhan di sekolah karena terdapat siswa ABK. Dengan banyaknya anak yang

berkebutuhan khusus pada 2 sekolah tersebut membuat peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana manajemen kesiswaan di kedua sekolah tersebut karena siswa kedua sekolah tersebut ternyata mampu bersaing dengan sekolah lain baik di bidang akademik maupun non akademik.

Sekolah inklusif adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik pada sekolah yang sama tanpa diskriminasi, ramah, dan humanis untuk mengoptimalkan pengembangan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang berdayaguna dan bermartabat. (Pearce dalam Saiful Malak, 2013:196) "*In an inclusive school, children are given equitable support so that every child can be able to participate physically, socially and academically with their peers*". Dalam sekolah inklusif, anak-anak diberikan kesempatan yang sama sehingga setiap anak dapat berpartisipasi secara fisik, sosial, dan akademis dengan rekan-rekan mereka.

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, jenis kelamin, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. (Booth dalam European Commission, 2013:13) mengatakan "*Inclusive education as the process of increasing participation and decreasing exclusion from the culture, curriculum and community of mainstream schools*". Dengan kata lain, pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Menurut Armstrong (2000:1) pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang berhubungan dengan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh anak tanpa perbedaan dan pemisahan. Dari beberapa pengertian pendidikan inklusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu penyelenggaraan layanan pendidikan yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dan anak normal dalam satu tempat atau satu sekolah sehingga dengan beragam kemampuan dan latar belakangnya dapat belajar bersama dan berhasil mencapai tujuan pendidikannya masing-masing.

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan inklusi bertujuan (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan

fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. Secara umum, tujuan pendidikan inklusi, yaitu memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Implementasinya adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan, dan lain-lain.

Manajemen peserta didik menurut Imron (1994:7) diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Manajemen yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan siswa secara langsung dan segi-segi lain yang berkaitan dengan siswa secara tidak langsung yang dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada siswa.

Langkah-langkah manajemen menurut menurut Imron, dkk (2003:6) terdiri dari empat proses, yaitu (1) *planning*; (2) *organizing*; (3) *actuating*, dan (4) *controlling*. Pendapat tersebut senada dengan Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2012:93) menerangkan bahwa proses manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan/memimpin (*leading*), dan pengawasan/pengendalian (*controlling*).

Menurut Badrudin (2014:37) kebijakan penerimaan peserta didik baru harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Walaupun setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tetapi tidak secara otomatis dapat diterima di suatu lembaga pendidikan, seperti sekolah karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima oleh suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah. Menurut Imron (1994:23) faktor-faktor kondisional sekolah tersebut, meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang

tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu, dan sebagainya.

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik, juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik juga berisi mengenai waktu pendaftaran, kapan dimulai, dan kapan diakhiri. Prihatin (2011:52) mengatakan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Petunjuk demikian harus dipedomani karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan.

Sistem yang dimaksud di sini lebih menunjukkan kepada cara. Berarti, sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Menurut Imron (1994:23) ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah, diterima semua begitu saja sehingga mereka yang mendaftar menjadi siswa, tidak ada yang ditolak. Sistem promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Sistem seleksi dapat digolongkan menjadi tiga macam. Pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai UAN, kedua berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), dan ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk (Imron, 1994:24). Pada sekolah dasar inklusi yang terjadi di lapangan, seleksi ditambahkan berdasarkan jenis kecacatan.

Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik atau tidak. Ada tiga kriteria penerimaan peserta didik. Pertama, kriteria acuan patokan (*standard criterion referenced*), yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, kriteria acuan norma (*norma criterion referenced*), yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Ketiga, yaitu kriteria yang didasarkan daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa calon peserta didik

baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian merangking prestasi siswa mulai dari yang berprestasi paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah. Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah, sampai daya tampung tersebut dipenuhi.

Menurut Imron (1994:27) prosedur penerimaan peserta didik baru adalah (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, (2) rapat penentuan peserta didik baru, (3) pembuatan/pemasangan/pengiriman pengumuman, (4) pendaftaran peserta didik baru, (5) seleksi, (6) penentuan peserta didik yang diterima, (7) pengumuman peserta didik yang diterima, dan (8) registrasi/daftar ulang peserta didik yang diterima. Kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah terbentuk umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan (SK) Kepala Sekolah. Panitia tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

Menurut Badrudin (2014:40) penempatan peserta didik yaitu kegiatan pengelompokkan peserta didik yang dilakukan menggunakan sistem kelas. Pengelompokkan peserta didik pada kelas (kelompok belajar) dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Pengelompokkan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Pengelompokkan juga dapat didasarkan pada perbedaan individu yang berupa minat, bakat, dan kemampuan.

Pengelompokkan lazim dikenal dengan *grouping* didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Pengelompokkan bukan dimaksudkan untuk mengkotak-kotakkan peserta didik, melainkan justru bermaksud membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin. Menurut Mitchun dalam Prihatin (2011:70) mengemukakan dua jenis pengelompokkan peserta didik, yaitu *ability grouping* dan *sub-grouping with in the class*. *Ability grouping* adalah pengelompokkan berdasarkan kemampuan di dalam *setting* sekolah, sedangkan *sub-grouping with in the class* adalah pengelompokkan berdasarkan kemampuan di dalam *setting* kelas. Menurut Prihatin (2011:71) pengelompokkan berdasarkan karakteristik peserta

didik dibagi menjadi tujuh, yaitu (1) pengelompokkan berdasarkan minat (*interest grouping*); (2) pengelompokkan berdasarkan kebutuhan khusus (*special need grouping*); (3) pengelompokkan beregu (*team grouping*); (4) pengelompokkan tutorial (*tutorial grouping*); (5) pengelompokkan penelitian (*research grouping*); (6) pengelompokkan kelas utuh (*full class grouping*); dan (7) pengelompokkan kombinasi (*combined class grouping*).

Menurut Badrudin (2014:49) pembinaan kesiswaan di sekolah merupakan tanggung jawab semua tenaga pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang selalu berhadapan dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab atas terselenggaranya proses tersebut di sekolah, baik melalui bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan. Seluruh tanggung jawab itu dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek pribadinya berkembang optimal.

Menurut Badrudin (2014:50) pembinaan kesiswaan dirinci ke dalam sub-sub kompetensi dan indikator-indikator sebagai rujukan penyelenggaraan pembinaan kesiswaan. Keseluruhan indikator dari enam kompetensi dapat dijadikan acuan, baik bagi penyelenggara pembinaan kesiswaan secara umum dalam program pendidikan di sekolah maupun secara khusus terpadu dalam program pembelajaran dan bimbingan yang menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran dan guru pembimbing. Pernyataan-pernyataan tentang kompetensi, subkompetensi, dan indikator yang dimaksud tertuang dalam matriks pada Tabel 1.

Jadi, secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan PPDB pada sekolah inklusi di SDN 1 Surotrunan Alian dan SDN Pecarikan Kebumen; (2) mendeskripsikan pengelompokkan dan penempatan siswa pada sekolah inklusi di SDN 1 Surotrunan Alian dan SDN Pecarikan Prembun Kebumen; dan (3) mendeskripsikan pembinaan kesiswaan pada sekolah inklusi di SDN 1 Surotrunan Alian Kebumen.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi multi situs dan menggunakan metode analisis data Milles Huberman (2009). Pengecekan keabsahan data menggunakan tiga kriteria, yaitu

Tabel 1. Standar Kompetensi Bidang Pembinaan Kesiswaan

No	Kompetensi	Sub kompetensi	Indikator
1.	Memahami perkembangan peserta didik	1.1 Memahami: - Karakteristik perkembangan peserta didik - Perkembangan fisik psikomotor - Perkembangan sosial emosional - Perkembangan intelektual, bakat dan minat - Perkembangan kreatifitas	1.1.1 Adanya pembinaan yang memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam hal: - Tahap-tahap perkembangan peserta didik - Pemahaman gejala perubahan fisik dan perilaku motorik - Kehidupan sosial emosional berkelompok ( <i>peer group</i> ) - Prestasi akademik dan nonakademis - Orisinalitas dan fleksibilitas
2.	Memahami ruang lingkup pembinaan kesiswaan	2.1 Memahami lingkup pembinaan: - Ketaqwaan kepada Tuhan YME - Kepribadian dan budi pekerti - Kepemimpinan - Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan - Kualitas jasmani dan kesehatan - Seni buda - Pendidikan pendahuluan bela negara dan wawasan kebangsaan	2.1.1 Lingkup pembinaan kesiswaan: - Terdapat pelaksanaan sosial keagamaan, adanya toleransi kehidupan beragama, terdapat kegiatan hari besar keagamaan, adanya kegiatan seni dan budaya yang bernafaskan keagamaan - Terlaksananya tata tertib dan tata krama dalam kehidupan sosial di sekolah, sikap saling menghormati antar masyarakat sekolah - Terlaksananya aktivitas OSIS, kelompok belajar, latihan dasar kepemimpinan, forum diskusi - Ada dan terlaksananya koperasi sekolah, adanya kumpulan hasil karya dan prestasi siswa - Adanya aktivitas PMR, kantin sekolah, olahraga, UKS, kegiatan sosial, kegiatan 6K - Adanya berbagai kegiatan seni budaya - Terlaksananya upacara bendera, peringatan hari besar nasional, bakti sosial, wisata alam, napak tilas, pelestarian alam, taat tata tertib.
3.	Mampu merancang dan melaksanakan strategi pembinaan kesiswaan	3.1 Merancang strategi pelaksanaan pembinaan kesiswaan 3.2 Merancang kegiatan ekstrakurikuler 3.3 Merancang kegiatan ekstrakurikuler melalui latihan terprogram 3.4 Menciptakan kegiatan kompetensi	3.1.1 Terdapat rencana tertulis pelaksanaan pembinaan kesiswaan 3.1.2 Adanya program kegiatan ekstrakurikuler 3.1.3 Ada program-program pelatihan dan kompetensi kegiatan ekstrakurikuler 3.1.4 Terdapat kegiatan kompetensi
4.	Mampu mengembangkan kegiatan pembinaan kesiswaan	4.1 mengembangkan jenis-jenis kegiatan pembinaan kesiswaan	4.1.1 Terdapat berbagai jenis kegiatan pembinaan kesiswaan, baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah 4.1.2 Terdapat berbagai kegiatan pembinaan kesiswaan yang bersifat edutainment, pembinaan mental, agama, kompetitif, pelatihan dan ekspose
5.	Mampu merancang dan mengembangkan evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan	5.1 Memahami konsep dasar dan jenis evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan 5.2 Mampu merancang instrumen evaluasi pembinaan kesiswaan	Adanya instrumen evaluasi program dan hasil, baik dalam bentuk tes maupun non tes

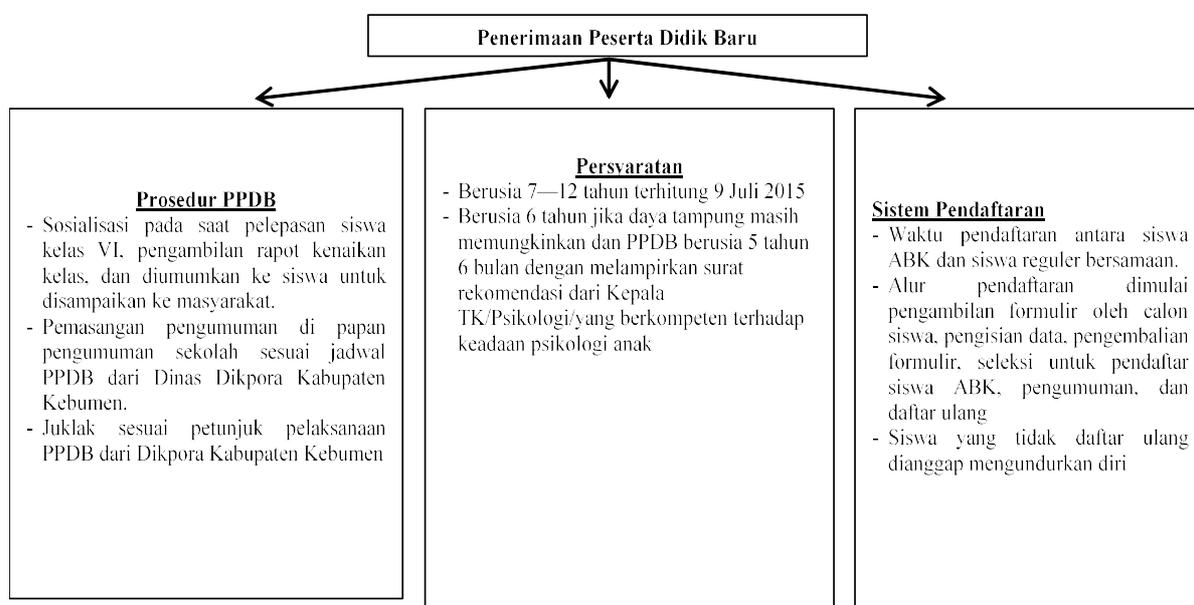
kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kedua situs dalam penelitian ini adalah SDN 1 Surotrunan Alian dan SDN Pecarikan Prembun Kebumen. Teknik pengambilan data menggunakan teknik (1)

wawancara mendalam (*indepth interviewing*), (2) observasi partisipan (*participant observation*), (3) studi dokumentasi. Analisis data terdiri atas analisis data dalam situs dan analisis data lintas situs.

**HASIL**

Temuan penelitian lintas situs yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan PPDB siswa reguler maupun siswa ABK dilaksanakan bersamaan. Waktu dan jadwal pelaksanaan sesuai dengan juklak PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pelaksanaannya pada tahun pelajaran 2015/2016, yaitu minggu ke tiga bulan Juni tepatnya tanggal 22—24 Juni 2015 selama tiga hari. *Kedua*, sebelum pelaksanaan sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan dengan wali murid seperti pertemuan dengan komite sekolah, pengambilan rapat kenaikan kelas dan pada saat acara perpisahan kelas VI. *Ketiga*, untuk

mempermudah pelaksanaan PPDB dibentuklah kepanitiaan dan yang masuk dalam kepanitiaan, yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. *Keempat*, sistem pendaftarannya yaitu: (a) pengumuman dan sosialisasi kepada masyarakat, (b) pengambilan formulir oleh calon siswa, (c) pengisian data, dan (d) pengembalian formulir. *Kelima*, sistem penerimaan siswa baru pada situs I seleksi khusus siswa ABK, sedangkan pada situs II tidak ada sileksi untuk siswa ABK. *Keenam*, kuota setiap tahunnya pada situs I adalah maksimal 3 siswa ABK. Untuk situs II tidak dibatasi. *Ketujuh*, setiap siswa akan di tes IQ sebagai dasar pengelompokkan siswa dan pengamatan/observasi setiap hari kepada siswa tentang perkembangan belajar siswa. Temuan tersebut diringkas ke dalam diagram konteks, seperti terlampir pada Gambar 1.



**Gambar 1. Diagram Konteks Temuan Penelitian tentang PPDB**

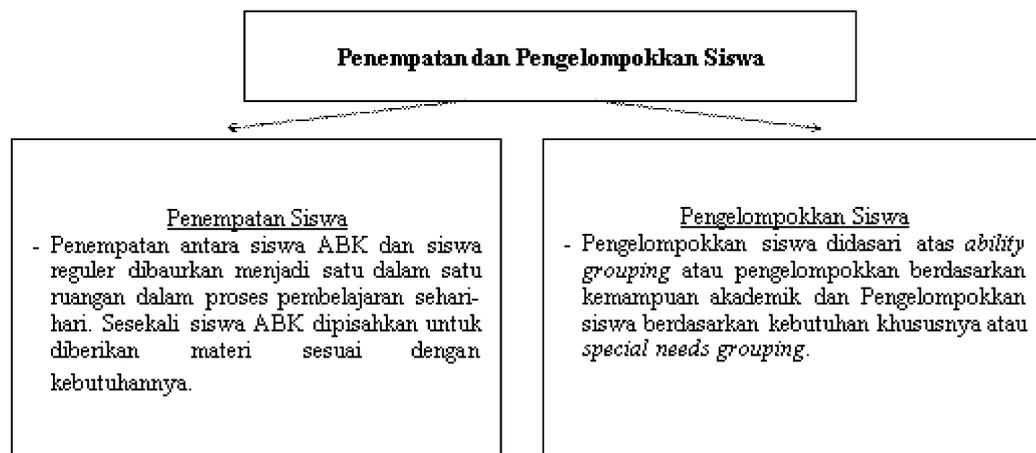
Temuan lintas situs yang berkaitan dengan penempatan dan pengelompokkan siswa sebagai berikut. *Pertama*, penempatan siswa reguler dan siswa ABK menjadi satu dalam satu kelas. *Kedua*, terdapat 3 jenis pengelompokkan siswa, yaitu (1) pengelompokkan berdasarkan dari tingkat kecerdasan atau *intelligence grouping*; (2) pengelompokkan berdasarkan kemampuan akademik atau *ability grouping*; dan (3) pengelompokkan berdasarkan *special needs grouping*. Ketiga hal tersebut perlu dilakukan karena anak yang hasil tes kecerdasannya tinggi, belum

tentu kemampuan akademiknya juga tinggi dan kebutuhan terhadap mata pelajaran juga kurang. Dengan demikian, siswa yang seperti itu akan dikelompokkan dalam siswa ABK dan mendapat penanganan lebih dari siswa reguler. Ringkasan temuan pada temuan ini diringkas dalam diagram konteks seperti tertera pada Gambar 2.

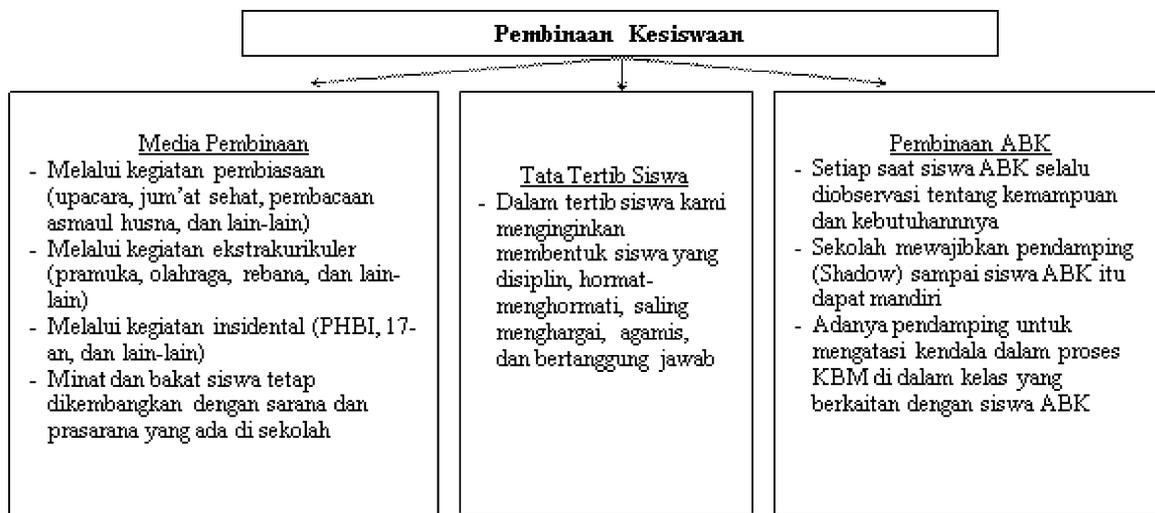
Temuan lintas situs yang berkaitan dengan pembinaan kesiswaan sebagai berikut. *Pertama*, pembinaan kesiswaan dilakukan dengan cara memberikan beberapa kegiatan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan insidental yang

berkaitan tentang PHBI, kerja bakti, dan sebagainya. *Kedua*, dalam hal tata tertib siswa dijalankan dengan sungguh-sungguh. *Ketiga*, setiap saat siswa ABK yang berada di dalam kelas diobservasi dan diperhatikan kebutuhannya. *Keempat*, apabila ada kendala ketika proses belajar mengajar di kelas terhadap anak ABK maka guru memanggil pendamping (*shadow*) untuk membantu mengatasi kendala tersebut. Sekolah mewajibkan pendamping pada setiap siswa ABK sampai sekolah memutuskan siswa tersebut sudah mandiri dan bisa ditinggal

sendiri. *Kelima*, sesekali siswa ABK dipisahkan dan disendirikan dari siswa yang lain untuk diberi materi sesuai dengan kebutuhan siswa ABK, dan pemberian keterampilan yang berkaitan dengan kemandirian siswa. *Keenam*, siswa ABK dan siswa reguler bakat dan minatnya pun tetap diperhatikan dan dikembangkan. Bakat dan minat siswa ABK diketahui dari hasil diskusi dan wawancara dengan orangtua siswa. Temuan tentang pembinaan kesiswaan ini diringkaskan dalam diagram konteks, seperti tertera pada Gambar 3.



Gambar 2. Diagram Konteks Temuan Penelitian tentang Penempatan dan Pengelompokan Siswa



Gambar 3. Diagram Konteks Temuan Penelitian tentang Pembinaan Kesiswaan

### PEMBAHASAN

Temuan penelitian pada fokus pertama menerangkan bahwa pelaksanaan penerimaan siswa baru baik siswa reguler maupun siswa ABK dilaksanakan bersamaan. Waktu dan jadwal pelaksanaan sesuai dengan juklak PPDB Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, pada tahun pelajaran 2015/2016 pelaksanaannya, yaitu minggu ke tiga bulan Juni tepatnya tanggal 22—24 Juni 2015. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihatin (2011:52) menjelaskan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.

Petunjuk demikian harus dipedomani karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan PPDB dibentuklah kepanitiaan. Para panitia tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kepanitiaan disahkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Sistem pendaftarannya, yaitu (a) pengumuman penerimaan peserta didik baru dan sosialisasi kepada masyarakat, (b) pengambilan formulir oleh calon siswa, (c) pengisian data, dan (d) pengembalian formulir. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron (1994:24) menjelaskan bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru, yaitu (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, (2) rapat penentuan peserta didik baru, (3) pembuatan/pemasangan/pengiriman pengumuman, (4) pendaftaran peserta didik baru, (5) seleksi, (6) penentuan peserta didik yang diterima, (7) pengumuman peserta didik yang diterima, dan (8) registrasi/daftar ulang peserta didik yang diterima. Kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah terbentuk umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan (SK) Kepala Sekolah.

Sistem penerimaan siswa baru pada situs I seleksi khusus siswa ABK, sedangkan pada situs II tidak ada seleksi untuk siswa ABK. Kuota setiap tahunnya pada situs I maksimal 3 siswa ABK, sedangkan untuk situs II tidak dibatasi. Hasil temuan ini sudah sesuai dengan pendapat Imron (1994:23) ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah, diterima semua begitu saja. Dengan kata lain, mereka yang mendaftar menjadi siswa, tidak ada yang ditolak. Sistem promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Sistem seleksi dapat digolongkan menjadi tiga macam. Pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai UAN, yang kedua berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk (Arifin:1994). Pada sekolah dasar inklusi yang

terjadi di lapangan seleksi ditambahkan berdasar jenis kecacatan.

Jadi, petunjuk pelaksanaan PPDB di sekolah mengacu pada juklak PPDB dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB di sekolah dibentuklah kepanitiaan, kepanitiaan PPDB terdiri dari Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Sistem pendaftarannya terdiri dari (a) pengumuman dan sosialisasi kepada masyarakat; (b) pengambilan formulir oleh calon siswa; (c) pengisian data; dan (d) pengembalian formulir. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru yaitu sistem promosi dan sistem seleksi.

Penempatan siswa reguler dan siswa ABK di situs 1 dan situs 2 menjadi satu dalam satu kelas. Hal ini dilakukan karena kedua situs tersebut merupakan sekolah inklusi. Seperti yang dikemukakan oleh Stainback (1996) sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Rose & Howley (Astuti, 2011) mengemukakan bahwa sekolah inklusi sebagai sekolah yang sistem layanan pendidikannya mempersyaratkan agar anak berkelainan dilayani di sekolah sesuai kemampuannya bersama-sama teman seusianya. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap peserta didik berterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Pengelompokkan siswa berdasarkan dari tingkat kecerdasan atau *intelligence grouping*, berdasarkan kemampuan akademik atau *ability grouping* dan berdasarkan *special needs grouping* atau sesuai dengan jenis kebutuhannya. Dengan adanya pengelompokan itu, maka keunikan masing-masing siswa dapat diperhatikan dan dipenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron (1994:73) menjelaskan bahwa alasan pengelompokkan peserta didik didasarkan atas realita bahwa peserta didik secara terus-menerus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik satu dengan yang lain berbeda. Agar perkembangan peserta didik yang cepat tidak mengganggu peserta didik yang lambat dan sebaliknya, maka dilakukan pengelompokkan peserta didik. Tidak jarang dalam pembelajaran yang menggunakan sistem klasikal, peserta didik yang cepat tidak sabar menunggu peserta didik yang lambat. Sebaliknya, peserta didik yang lambat tidak dapat mengejar peserta didik yang

cepat. Dengan kata lain, pengelompokan adalah konvergensi dari pengajaran sistem klasikal dan individual.

Pengelompokan yang dilakukan kedua situs tersebut sesuai dengan beberapa pendapat, salah satunya Mitchun dalam Prihatin (2011:70) mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik, yaitu *ability grouping* dan *sub-grouping with in the class*. *Ability grouping* adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam *setting* sekolah, sedangkan *sub-grouping with in the class* adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam *setting* kelas. Dengan kata lain, *ability grouping* yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik.

Menurut Prihatin (2011:71) pengelompokan berdasarkan karakteristik peserta didik dibagi menjadi tujuh, yaitu (1) pengelompokan berdasarkan minat (*interest grouping*), peserta didik yang berminat pada pokok bahasan tertentu, topik/tema tertentu membentuk ke dalam satu kelompok; (2) pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus (*special need grouping*), adalah pengelompokan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Peserta didik yang sebenarnya sudah tergabung dalam kelompok-kelompok, dapat membentuk kelompok baru untuk belajar keterampilan; (3) pengelompokan beregu (*team grouping*) adalah suatu kelompok yang terbentuk karena dua atau lebih peserta didik yang mempunyai keinginan bekerja dan belajar secara bersama-sama memecahkan masalah khusus; (4) pengelompokan tutorial (*tutorial grouping*) adalah suatu pengelompokan dimana peserta didik bersama-sama dengan guru merencanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya; (5) pengelompokan penelitian (*research grouping*), adalah suatu pengelompokan dimana dua atau lebih peserta didik menggarap suatu topik khusus untuk dilaporkan di depan kelas; (6) pengelompokan kelas utuh (*full class grouping*) adalah suatu pengelompokan dimana peserta didik secara bersama-sama mempelajari dan mendapatkan pengalaman dibidang seni; dan (7) pengelompokan kombinasi (*combined class grouping*) adalah suatu pengelompokan dimana dua atau lebih kelas yang dikumpulkan dalam satu ruangan untuk bersama-sama menyaksikan film, slide, TV, dan media audio visual lainnya. Pendapat mengenai pengelompokan *intelligence grouping* oleh Hendyat Soetopo dalam Imron (1994:88) menjelaskan bahwa *intelligence grouping* adalah pengelompokan yang didasarkan atas hasil kecerdasan atau intelegensi.

Jadi, sekolah inklusi adalah sekolah yang menempatkan siswa ABK dan siswa reguler ke dalam satu ruang kelas atau satu lingkungan sekolah. Penggunaan tiga jenis pengelompokan, yaitu *intelligence grouping*, *ability grouping* dan *special needs grouping* yang dilakukan oleh kedua situs karena jenis pengelompokan itulah yang sesuai dengan potensi, keadaan, dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua sekolah tersebut.

Temuan penelitian pada fokus yang ketiga yaitu pembinaan kesiswaan, dilakukan dengan cara memberikan beberapa kegiatan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan insidental. Kegiatan-kegiatan tersebut masuk ke dalam kegiatan pengembangan diri hal ini seperti yang diungkapkan Badrudin (2014:140) kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah yang disediakan oleh satuan pendidikan untuk menyalurkan minat, bakat, hobi, kepribadian, dan kreativitas peserta didik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memdeteksi talenta peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler bermacam-macam. Kegiatan ekstrakurikuler, meliputi kegiatan program akademis (O2SN), olahraga (O2SN) seni dan budaya (FLS2N), keagamaan, kepramukaan, latihan kepemimpinan, karya ilmiah remaja, palang merah remaja, pecinta alam, jurnalistik, teater, dan lain-lain.

Depdiknas dalam buku pedoman pembelajaran bidang pengembangan pembiasaan (2007:2) menyatakan bahwa kegiatan pembiasaan bertujuan untuk memfasilitasi anak untuk menampilkan totalitas pemahaman ke dalam kehidupan sehari-hari. Bidang pengembangan pembiasaan meliputi aspek perkembangan moral, dan nilai-nilai agama, serta perkembangan sosial, emosional dan kemandirian. Pembiasaan (*habituation*) merupakan proses pembentukan sikap perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Sikap dan perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri ciri sebagai berikut (1) perilaku tersebut relatif menetap; (2) pembiasaan umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi, misalnya untuk dapat mengucapkan salam cukup fungsi berpikir berupa mengingat atau meniru saja; (3) kebiasaan bukan sebagai hasil dari proses kematangan, tetapi sebagai akibat atau hasil pengalaman; dan (4) perilaku tersebut tampil secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus yang sama.

Kegiatan insidental disebut juga kegiatan spontan. Kegiatan ini dilakukan secara spontan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Contoh kegiatan ini adalah mengumpulkan sumbangan ketika ada teman sedang mendapatkan musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana. Kegiatan insidental merupakan kegiatan sekolah yang sifatnya tidak rutin diadakan setiap tahun. Kegiatan ini bersifat spontan dalam pembahasan waktu yang singkat, tidak dari hasil perencanaan pada awal tahun pelajaran. Kegiatan-kegiatan ini biasanya tidak masuk dalam RKA di RABS.

Dalam hal tata tertib siswa dijalankan dengan sungguh-sungguh bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pendidikan karakter yang baik bagi siswa. Penerapan karakter disiplin didasari dari pengelolaan sekolah dan pengelolaan kelas yang baik, hal ini sesuai dengan pendapat Priyatin (2011:94) pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin kelas yang baik. Kelas dinyatakan disiplin apabila setiap siswanya patuh pada aturan tata tertib yang ada sehingga dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan belajar. Kelas yang disiplin tidak sama dengan kelas yang tenang.

Priyatin (2011:96) mengemukakan tiga teknik pembinaan disiplin di kelas. Pertama, teknik *Inner Control*, yaitu teknik dengan cara menumbuhkan kesadaran akan tata tertib dan pada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Kedua, teknik *eksternal control*, yaitu mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan. Ketiga, teknik *cooperitive control*, yaitu pembinaan disiplin dilakukan dengan bekerjasama guru dan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah tujuan kelas yang bersangkutan.

Sekolah mewajibkan adanya pendamping (*shadow*) bagi siswa ABK dari wali siswa karena guru pendamping khusus (*shadow teacher*) belum ada. Hal ini dilakukan apabila ada kendala ketika proses belajar mengajar di kelas terhadap anak ABK maka guru memanggil pendamping (*shadow*) untuk membantu mengatasi kendala tersebut. Pentingnya siswa ABK memiliki pendamping (*shadow*) seperti penjelasan Nur'aeni, dkk (2014:322) *Shadow teacher* atau guru pendamping adalah seorang pendamping di bidang pendidikan prasekolah dan sekolah dasar yang bekerja secara langsung dengan seorang anak berkebutuhan khusus selama masa tahun-tahun prasekolah dan sekolah dasar. Salah satu karakteristik *shadow teacher* yaitu memahami keanekaragaman dari anak-anak dengan kondisi

kekhususan dan bagaimana menanganinya dengan baik dan benar. Menyediakan guru pembimbing khusus yang berkualitas dan berkompeten membuat anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti kelas dengan maksimal ketika perhatian penuh dan fokus diperlukan bagi seorang anak untuk menerima dan memproses informasi yang disampaikan ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas.

Pada pembelajaran individual dituntut adanya guru pendamping khusus atau *shadow teacher* untuk masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan guru pendamping *shadow teacher* di sekolah inklusi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi untuk prioritas terpenuhinya. Hal ini sesuai dengan kajian dari Ludlow dalam Nur'aeni, dkk (2014:322) mengemukakan bahwa sekolah pedesaan telah mengalami masalah utama yang berhubungan dengan aspek persiapan dari SDM dalam pendidikan khusus, kurangnya program pelayanan khusus yang dirancang untuk mempersiapkan personil untuk program sekolah inklusi, SDM lebih tepat jika dilatih dan kesulitan yang signifikan dalam merekrut, mempertahankan dan pelatihan ulang untuk guru pendamping (*shadow teacher*) dan terapis.

Jadi, pembinaan kesiswaan penting dilaksanakan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pembinaan kesiswaan dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, ekstrakurikuler, dan kegiatan insidental. Pembinaan kedisiplinan siswa merupakan salah satu bagian penting pembinaan kesiswaan dengan teknik yang tepat dalam pembinaan disiplin. Pendamping sangat dibutuhkan dalam pembinaan siswa ABK terlebih di sekolah inklusi karena guru di sekolah inklusi juga harus memerhatikan dan memberi perhatian kepada siswa reguler juga.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sesuai dengan jабaran fokus penelitian sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen. *Kedua*, sistem penerimaan siswa baru di sekolah inklusi sama dengan sekolah pada umumnya, yaitu menggunakan sistem promosi dan sistem seleksi. Hal ini tergantung situasi dan kondisi serta animo masyarakat untuk mendaftarkan di sekolah tersebut.

Faktor lain yaitu kuota atau daya tampung masing-masing sekolah setiap tahunnya. *Ketiga*, prosedur penerimaan di kedua sekolah tersebut berjalan sesuai aturan. Prosedur diawali dari pembentukan panitia, penerimaan peserta didik, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi/daftar ulang bagi peserta didik yang diterima. *Keempat*, pengelompokan siswa berdasarkan kecerdasan (*intelligent grouping*), berdasarkan kemampuan akademik (*ability grouping*), dan berdasarkan kebutuhan khusus (*special need grouping*). *Kelima*, pembinaan kesiswaan berjalan dengan baik, bermacam-macam kegiatan di antaranya kegiatan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan insidental. Perencanaan program kegiatan, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan pembiasaan perlu dikembangkan dan diperbaiki. Dengan perencanaan yang matang maka diharapkan kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian tentang manajemen kesiswaan pada sekolah inklusi ini hendaknya direvisi dan dilengkapi sebagai sarana meningkatkan layanan pendidikan inklusi di Kabupaten Kebumen. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pendampingan, arahan, dan solusi yang berkaitan dengan kendala yang dialami dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusi yang berkaitan dengan materi dan metode yang digunakan untuk menangani siswa ABK. *Kedua*, bagi kepala sekolah agar menerapkan manajemen kesiswaan yang baik penting dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan inklusi untuk siswa ABK maupun siswa reguler di sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pertimbangan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan manajemen kesiswaan di sekolah. *Ketiga*, bagi guru. Program-program kegiatan pembinaan kesiswaan seyogyanya dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan demi menciptakan pelayanan yang optimal dan memberi wadah untuk menyalurkan bakat, minat, dan potensi siswa serta menanamkan karakter yang positif bagi siswa di kelas maupun di lingkungan sekolah. *Keempat*, bagi peneliti lain. Penelitian ini

dapat menjadi referensi dalam penelitian manajemen kesiswaan pada sekolah inklusi ataupun penelitian lanjutan dengan pendekatan yang berbeda untuk menambah khasanah dan keilmuan tentang manajemen kesiswaan di sekolah inklusi.

### DAFTAR RUJUKAN

- Armstrong, F. 2000. *Inclusive Education*. London: David Fulton Publisher.
- Badrudin. 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Indeks.
- Depdiknas. 2007. *Pedoman pembelajaran Bidang Pengembangan Pembiasaan di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- European Commission. 2013. Support for Children with Special Educational Needs (SEN). *Journal Employment, Social Affairs & Inclusion*. Page 2—25.
- Imron, A. 1994. *Manajemen Peserta Didik di Sekolah*. Malang: FIP UM.
- Imron, dkk. 2003. *Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UM Press.
- Malak, S. 2013. Inclusive Education Reform in Bangladesh: Pre-Service Teachers' Responses to Include Students with Special Educational Needs in Regular Classrooms. *International Journal of Instruction*, 6 (1):196—214.
- Miles, M.B & Huberman, A.M.1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Alih Bahasa Rohidi, T. R. Jakarta: UI Press.
- Nur'aeni, dkk. 2014. Model Program Pembelajaran Individual untuk Peserta Didik dengan Kesulitan Belajar melalui Pelatihan Terapi Gerak bagi Shadow Teacher di SD Inklusi. *Prosiding SnaPP 2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 4: (1) 319—326.
- Permendiknas. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kemendiknas.
- Prihatin, E. 2011. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Dosen AP UPI. 2012. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.